



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2010
DAFTAR ISI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

RKPD merupakan Penjabaran dari RPJMD Tahun 2007 – 2011 untuk Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan draf Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 dibahas bersama dengan DPRD menjadi Nota Kesepakatan. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2010.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2010 dimulai sejak awal Tahun 2009 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Untuk melengkapi proses musrenbang juga dilaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui survey terhadap 1.350 responden di 45 kelurahan yang meliputi tokoh masyarakat, pengusaha dan masyarakat baik yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) maupun yang tidak berKMS.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Tematik pembangunan Tahun 2010 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD adalah : " Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai ".

Makna "Kota **Sehat**" adalah kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Dalam mewujudkan kota yang sehat harus mampu memenuhi tatanan sebagai kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang memadai, kawasan tertib sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan perkantoran sehat, kawasan

pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi masyarakat, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan kehidupan sosial yang sehat.

Makna "Kota **yang Nyaman Huni**" adalah kota yang memberikan kenikmatan dan rasa aman sebagai tempat hunian dan meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta tersedianya sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan yang sesuai standar cakupan layanan. Dalam meningkatkan kesehatan lingkungan perlu adanya penambahan ruang terbuka hijau serta taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota.

Dalam mewujudkan kota nyaman huni harus memenuhi kota yang aman sebagai tempat hunian, kebersihan dan kesehatan lingkungan sesuai standar yang ditetapkan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan taman kota sebagai paru-paru kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

RKPD disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain mendasarkan pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas, penyusunan RKPD juga mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta dan sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Adapun Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.
2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2010.
3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. SISTIMATIKA RKPD

RKPD Tahun 2010 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2008

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN.

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD TAHUN 2008

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2008 sebesar 4,73% lebih tinggi dari Tahun 2007 yang sebesar 4,47%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 tersebut paling besar disumbang dari sektor bangunan yang tumbuh sebesar 9,36% disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,28% kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,07%.

PDRB harga berlaku pada Tahun 2008 ada sebesar Rp.9.540.256.000.000,- (sembilan trilyun lima ratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) naik sebesar 11,27% dari Tahun 2007 yang sebesar Rp. 8.573.796.000.000,- (delapan trilyun lima ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Sedangkan untuk PDRB harga konstan Tahun 2008 naik 4,73% dari Tahun 2007 Rp.4.776.401.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus satu juta rupiah) menjadi Rp.5.002.105.000.000,- (lima trilyun dua milyar seratus lima juta rupiah).Pendapatan perkapita masyarakat mengalami kenaikan sebesar 9,53% dari Rp.19.062.569,- (sembilan belas juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) pada Tahun 2007 menjadi Rp.20.879.717,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) pada Tahun 2008

Jumlah penduduk pada tahun 2008 menurut data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil ada sebanyak 444.236 jiwa dengan jumlah KK ada 88.847 KK. dari jumlah tersebut ada 18,31% yang merupakan penduduk miskin (KMS)

Pada sektor pendidikan kemajuan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi Kasar (APK). APM pada tahun 2008 untuk SD sebesar 122,36%, SMP 84,4%, SMA/SMK 80,85% . Jika dibandingkan dengan APM pada tahun 2007 maka masing-masing mengalami penurunan, yaitu APM SD 125,77%, SMP 92,71% dan SMA/SMK 86,37 %. Untuk APK pada Tahun 2008 juga mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2007. APK pada Tahun 2007 SD sebesar 144,01 %, SMP 124,97%, SMA/SMK 116,52% yang menurun pada Tahun 2008 untuk SD menjadi sebesar 139,11%, SMP 110,92%, SMA/SMK 108,97%

Mengenai masalah ketenagakerjaan pada Tahun 2008 juga mengalami perbaikan dibanding pada Tahun 2007. Angka partisipasi kerja pada Tahun 2008 sebesar 0,89 dibanding pada Tahun 2007 yang hanya 0,86.

Adapun perkembangan indikator makro secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel Berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

No	Indikator	Tahun 2007	Kondisi yang dicapai Tahun 2008
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	4,47	4,73
2.	Laju inflasi (%)	7,99	7,03
3.	PDRB berlaku (Rp.)	8.573.796.000.000	9.540.256.000.000
4.	PDRB konstan (Rp.)	4.776.401.000.000	5.002.105.000.000
5	PDRB per kapita (Rp.)	19.062.569	20.879.717
9.	Jumlah Penduduk (jiwa)	528.789	444.236
10.	Jumlah Penduduk (KK)	105.758	88.847
11.	Penduduk miskin (Jiwa)	89.818	81.334
12.	Laju pertambahan Penduduk (LPP) %	1,07	1,93
13.	Angka Partisipasi Murni		
	a. SD	125,77	122,36
	b. SMP	92,71	84,4
	c. SMA/SMK	86,37	80,85
14.	Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD	144,01	139,11
	b. SMP	124,97	110,92
	c. SMA/SMK	116,52	108,97
15.	Angka melek huruf	97,6	97,5
17.	Angka Kematian bayi	3,1	7,3
18.	Angka usia harapan hidup	73,1	73,2
19.	Angka partisipasi angkatan kerja	0,86	0,89
20	Jumlah Pengangguran	34.521	37.253

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2008

2.2.1. Urusan Pendidikan

Kota Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan predikat tersebut dan terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam rangka mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, dilakukan dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta dapat mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi kompetensi tinggi, meminimalisir berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan di Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada empat indikator, yaitu mutu produk/lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu layanan sekolah, dan mutu lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (*life skill*).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2008 telah menunjukkan keberhasilan, hal ini terlihat dari :

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SD 99,80%, SMP 99,60 dan SMA/SMK 98,5%.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD 139,38%, SMP 121,24% dan SMA/SMK 111,88%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD 125,96%, SMP 92,84% dan SMA/SMK 87,08%.
- Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 130 orang pada Tahun 2007 menjadi 48 orang pada Tahun 2008. Masih adanya siswa yang putus sekolah tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan lebih disebabkan siswa yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya hingga selesai.
- Penyaluran jaminan pendidikan berupa beasiswa kepada 18.361 siswa, bantuan registrasi untuk 5.572 siswa dan bantuan herregistrasi kepada 12.789 siswa, bantuan biaya praktek bagi 2.644 siswa SMK serta bantuan seragam OSIS dan olah raga kepada 5.572 siswa.
- Prosentase guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi, yaitu rata-rata mencapai 95% atau meningkat % dibandingkan Tahun 2007. Demikian pula halnya dengan jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 774 guru pada tahun 2007 menjadi 1.391 guru pada Tahun 2008.
- Prosentase kelulusan siswa Tahun 2008 mengalami kenaikan di jenjang SD dan SMP dibandingkan dengan Tahun 2007, yaitu SD 99,89% menjadi 100%, dan SMP dari 89,87% menjadi 92,80%, namun untuk jenjang SMA dan SMK mengalami

penurunan (SMA sebesar 0,57 dan SMK 4,17%). Hal ini disebabkan jumlah mata pelajaran yang di-UNAS-kan bertambah dari 3 (tiga) mata pelajaran menjadi 6 (enam) mata pelajaran dan pada tahun yang sama standar kelulusan ditingkatkan.

- Rehabilitasi terhadap 47 SD dengan menggunakan dana DAK. Melalui rehabilitasi gedung sekolah, maka prosentase ruang kelas kondisi lebih baik dibandingkan dengan seluruh ruang kelas untuk setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari 93,50 % pada Tahun 2007 menjadi 96,37% pada Tahun 2008.

Peningkatan dan pengembangan Taman Pintar melalui promosi langsung ke daerah di luar Kota Yogyakarta, iklan di berbagai media, bekerja sama dengan beberapa pihak penyelenggaraan berbagai event yang menarik dan menyerap banyak pengunjung, pemasaran lokasi usaha untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan bersifat entertainment sebagai penyeimbang tampilan alat-alat peraga sains dan pendidikan pemberian *free pass* bagi setiap tour leader yang membawa rombongan lebih dari 50 orang dan kelipatannya, mengatur prosedur penerimaan kunjungan, serta membuat dan mengirim *press release* untuk mensosialisasikan perkembangan Taman Pintar. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar meningkat dari 311.914 orang pada Tahun 2007 menjadi 794.609 orang pada Tahun 2008.

Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada Tahun 2008 telah diluncurkan bantuan dana sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada 614 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan prasarana pada Lembaga PAUD.

Memfasilitasi pembentukan perpustakaan komunitas di tingkat RW se Kota Yogyakarta selalui bantuan perpustakaan RW dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan meningkatkan budaya dan minat baca bagi masyarakat.

- Pengangkatan GTT/PTT di sekolah negeri menjadi PTT Pemerintah Kota Yogyakarta dan meningkatkan insentif bagi GTT, GTY dan PTT.
- Mengembangkan Sekolah Berbasis Internasional sebagai upaya peningkatan kualitas belajar mengajar di 14 sekolah.
- Meningkatkan wawasan siswa dengan mengirimkan siswa mengikuti program pertukaran pelajar.
- Pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) secara on line untuk meningkatkan transparansi dalam penerimaan siswa baru di setiap jenjang sekolah.

Pelaksanaan urusan pendidikan pada Tahun 2008 telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan Mitra PAUD Tingkat Nasional.
- Presiden RI menganugerahkan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Pendidikan.

2.2.2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu menekan jumlah kematian ibu melahirkan, jumlah kematian balita dan jumlah kematian bayi. Jumlah kematian ibu melahirkan Tahun 2008 yaitu 1 dari 5.032 kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu 19,87 per 100.000 kelahiran hidup), jumlah kematian ibu mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standart nasional yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan jumlah kematian balita 8 dari 5.032 kelahiran hidup (angka kematian balita 1,58 per 1.000 kelahiran hidup). Angka ini juga jauh lebih rendah dari standard nasional yaitu 58 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi 28 dari 5.032 kelahiran hidup (angka kematian bayi 5,56 per 1.000 kelahiran hidup). Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi juga relatif rendah dibandingkan dengan standard nasional yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya jumlah balita dengan status gizi buruk. Apabila pada Tahun 2007 jumlah balita dengan gizi buruk sebanyak 214 balita(1,1%), maka pada Tahun 2008 menurun menjadi 199 balita (0,98%). Upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita dengan status gizi buruk yaitu pemberian makanan tambahan pemulihan selama 100 hari pada balita gizi buruk dari keluarga miskin pemberian vitamin dan suplemen besi pada 214 balita gizi buruk, membuka klinik konsultasi gizi di 18 puskesmas pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyakit penyerta pada balita gizi buruk, selanjutnya dikonsultasikan pada dokter spesialis anak. Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK juga dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang tersebar sampai tingkat RW sebagai pendamping balita gizi buruk.

Jumlah penderita untuk beberapa penyakit menular dan tidak menular mengalami penurunan pada tahun 2008 dibanding Tahun 2007. Penurunan yang signifikan terjadi pada penderita TBC yaitu 9,51%. Hal ini dikarenakan kesadaran yang tinggi pada penderita untuk mengikuti program pengobatan secara tuntas. Selain itu jumlah penderita diabetes melitus juga mengalami penurunan 17,52%, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berolahraga meningkat.

Walaupun ada penurunan jumlah penderita di beberapa penyakit, namun jumlah penderita HIV dan DBD meningkat. Pada Tahun 2007 jumlah penderita HIV 139 orang, sedangkan Tahun 2008 meningkat menjadi 176 penderita atau meningkat 26,6%. Meningkatnya jumlah penderita HIV menunjukkan keberhasilan program penemuan penderita HIV/AIDS karena masih adanya rasa malu pada penderita untuk diperiksa dan berobat. Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini adalah dibukanya pelayanan untuk konselor test sukarela dan pengobatan HIV secara komprehensif. Penderita DBD pada Tahun 2007 berjumlah 767 penderita dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 768 penderita, meningkatnya jumlah penderita DBD dikarenakan masih rendahnya Angka Bebas Jentik nyamuk yaitu 87% dari target 95% Upaya pengendalian DBD Tahun 2008

dengan sumilarvisasi belum dapat menjangkau perindukan nyamuk yang berada di luar rumah dan lahan kosong. Beberapa upaya untuk menekan angka penyakit menular dan tidak menular telah dilakukan, salah satunya dengan pengangkatan tenaga surveilans kelurahan yang bertujuan untuk membantu dalam melakukan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa suatu penyakit.

Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari pemulihan dan peningkatan sarana prasarana, pembangunan gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang representatif, kualitas obat di puskesmas yang semakin baik dan kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas dari 561.651 pada Tahun 2007 menjadi 666.401 pada Tahun 2008 atau meningkat 18,67%. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, terbukti dari hasil survey pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan dari 0,73 pada Tahun 2007 menjadi 0,77 pada Tahun 2008. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Puskesmas berada pada katagori memuaskan. Adapun nilai indeks kepuasan dilihat dari transparansi pelayanan, persepsi waktu tunggu, etika pelayanan, prosedur pelayanan dokter, konteks fasilitas dan reponsibilitas.

Hal lain yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat utamanya masyarakat miskin, pengurus RT, RW, LPMK, PKK RW, kader kesehatan, penjaga tempat ibadah, pegawai, guru tidak tetap dan pekerja sosial masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 2008 melakukan launching program YES 118 (Yogyakarta Eemergency Service). YES 118 merupakan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan medis yang bekerja sama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta, 10 rumah sakit umum dan pihak asuransi kesehatan. Dengan adanya program YES 118 ini diharapkan masyarakat dapat mengakses 118 apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Layanan YES 118 dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Biaya perawatan dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan.

Terkait dengan kinerja RSUD Wiroshan dapat disampaikan bahwa dalam tahun 2008 terjadi peningkatan kinerja RSUD. Adanya peningkatan ini tampak dari pelayanan rawat jalan yang menunjukkan peningkatan kunjungan rawat jalan dari 71.177 kunjungan pada Tahun 2007 menjadi 81,37 pada Tahun 2008 atau mengalami kenaikan sebesar 14,31%, rawat darurat meningkat dari 27,960 pada Tahun 2007 menjadi 28,478 kunjungan pada Tahun 2008 atau mengalami kenaikan sebesar 1,85%. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) Tahun 2008 sebesar 66,40%. Peningkatan pelayanan di

RSUD Wirosaban juga berdampak pada meningkatnya prosentase indeks kepuasan layanan dari 65% pada Tahun 2007 menjadi 68% pada Tahun 2008 atau meningkat 3%. Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, Tahun 2008 pendapatan RSUD Wirosaban mencapai 13.340.326.787,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dibandingkan dengan Tahun 2007 yang mencapai Rp. 10.942.142.526,00 (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) maka pendapatan RSUD Wirosaban mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.398.184.261,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau 21,92%. Dalam pengembangan RSUD Wirosaban, pada Tahun 2008 telah dilakukan pembebasan lahan seluas 464 m² untuk perluasan RSUD Wirosaban. Seiring dengan pembangunan tersebut, RSUD juga meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan medis adat dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Pelaksanaan urusan kesehatan pada Tahun 2008 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari Departemen Kesehatan RI.

2.2.3. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari pada suatu kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Melalui program pengembangan kinerja persampahan telah dilakukan pembersihan sampah pada 249 penggal jalan, pengangkutan sampah dengan volume 1.305 m³/hari, pemeliharaan sarana prasana Saluran Air Limbah (SAL) berupa pelumpuran, pembuatan *manhole* dan rehab SAL. Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah, Program Kali Bersih (Prokasih) dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir). Hasil yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap 4 sungai di 36 kelurahan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengawasan dan pembinaan terhadap 29 perusahaan dan 50 titik sampling kualitas lingkungan hidup, penyelesaian 12 kasus pencemaran lingkungan hidup serta sarasehan prokasih di 36 Kelurahan.

Terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau, kita bertekad mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau, teduh, indah dan nyaman. Untuk mewujudkan tekad tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pemeliharaan terhadap 73.036 m² jalur hijau dan taman kota.
- Mengembangkan taman pada jalur-jalur jalan protokol dengan konsep taman pergola.

- Penanaman pohon-pohon besar/pelindung di ruang-ruang kota sekaligus berfungsi sebagai elemen estetis kota.
- Meningkatkan penyebaran taman dan penyediaan taman-taman di lingkungan padat penduduk dan meningkatkan peran serta dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan taman di lingkungan.
- Membebaskan lahan 2.609 m² di lokasi untuk ruang terbuka dan sebagai sarana interaksi masyarakat.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang sehat dan ramah lingkungan, telah dilaksanakan gerakan SEGO SEGAWA sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk kembali menggunakan sarana transportasi sepeda untuk berangkat kerja maupun sekolah. Melalui SEGO SEGAWA ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, hemat energi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada Tahun 2008 telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain : Diterimanya penghargaan Adi Nugraha dari Terang Abadi Televisi (TATV) sebagai Walikota peduli lingkungan.

2.2.4. Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kota Yogyakarta, ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas dan jangkauan sangat diperlukan.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pekerjaan umum adalah :

- Kerusakan sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih, sanitasi perkotaan, perumahan dan permukiman, jalan dan jembatan.
- Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan.

Permasalahan lain yang dihadapi berupa beban pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum seiring dengan meningkatnya jumlah lampu penerangan jalan umum yang dipasang pada ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta, serta masih terjadinya genangan air pada saat musim hujan di Kota Yogyakarta.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

- Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerja sama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta.
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
- Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

- Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

Sebagai upaya penghematan pemakaian rekening listrik penerangan jalan umum, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai langkah, antara lain meterisasi lampu PJU, lampu hias dan traffic light, penataan ulang titik-titik PJU, penggunaan lampu hemat energi, serta pelimpahan wewenang kepada LPMK untuk mengelola lampu lingkungan di Kelurahan. Langkah-langkah penghematan yang dilaksanakan dalam penghematan listrik telah membawa hasil berupa diperolehnya pendapatan sebesar Rp. 17.864.484.847,00 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dari pajak penerangan jalan. Sedangkan beban rekening penerangan jalan umum untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.504.801.828,00 (enam milyar lima ratus empat juta delapan ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainage telah dilakukan normalisasi drainage melalui pemeliharaan Saluran Air Hujan sehingga prosentase saluran air hujan kondisi baik meningkat dari 84,80% pada Tahun 2007 menjadi 85,68% pada Tahun 2008.

Untuk mewujudkan suasana yang nyaman dan aman dalam mendukung predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan infrastruktur, baik melalui pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 8.028 buah dan lampu hias sebanyak 450 buah, pemasangan PJU lingkungan sebanyak 7.022 unit dan lampu antik sebanyak 3.000 unit. Dengan adanya kegiatan pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum tersebut, sampai dengan tahun 2008 jumlah penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 17.617 titik pada tahun 2007 menjadi 19.715 titik dalam tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 8,13%. Perbaikan infrastruktur lain yang dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Dari kegiatan tersebut, jalan dengan kondisi baik meningkat dari 94.371,95 meter pada Tahun 2007 menjadi 99.153,37 meter pada Tahun 2008. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik genangan dari 84 titik menjadi 74 titik.

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan dalam urusan penataan ruang adalah belum selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta dan sampai dengan saat ini Raperda dengan Pansus DPRD Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai pedoman penataan ruang di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta masih menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTRK) Kotamadya Dati II

Yogyakarta Tahun 1999-2004. Pemberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Dalam Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004.

Pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Kota Yogyakarta terus ditingkatkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta. Diharapkan ke depan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dapat menjadi pedoman dalam pemetaan wilayah dan kawasan serta merupakan master plan dan pedoman dalam perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta.

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu model perencanaan partisipatif terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah.

Proses perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota dengan maksud mempertajam usulan rencana di maksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah.

Untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan E-Procurement sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diluncurkan pada tanggal 12 Juli 2008. Sampai dengan akhir tahun 2008 penyedia barang/jasa yang melakukan registrasi secara online sebanyak 191, selanjutnya telah dilaksanakan pelelangan secara elektronik sebanyak 11 paket pekerjaan, pelatihan penggunaan aplikasi e-procurement bagi 126 penyedia barang/jasa dan 68 pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan.

Kesetaraan besaran belanja dengan output kegiatan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran sehingga secara makro kinerja APBD Pemerintah Kota lebih mampu menyesuaikan dengan prioritas-prioritas pembangunan daerah.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan tersebut memperoleh apresiasi dengan diundangnya Walikota Yogyakarta sebagai salah satu pembicara dalam *Berlin Summer Dialogue 2008* atas undangan dari Pemerintah Republik Jerman bekerjasama dengan Depdagri dengan materi ceamah tentang migrasi, urbanisasi dan pembangunan, review dan strategi pemerintahan perkotaan.

2.2.7. Urusan Perumahan

Sebagai kawasan dengan jumlah penduduk relatif padat, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan perhatian terhadap ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat.

Perkembangan kota yang tidak terkendali atau tidak dikelola dengan baik dapat memicu munculnya permasalahan lingkungan, sosio kultural dan ekonomi pada masa yang akan datang. Sebagai daerah perkotaan dengan tingkat perkembangan relatif tinggi, maka pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak huni terutama bagi golongan rakyat miskin menjadi sesuatu yang mendesak. Pemenuhan akan perumahan yang layak huni tidak mudah untuk dilaksanakan, karena kurang tersedianya sarana dan prasarana perumahan yang memadai dan terbatasnya ketersediaan lahan. Di samping itu, kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumnya relatif padat sehingga menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran, kondisi ini dapat dilihat dari data bahwa pada Tahun 2008 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 51 kali kebakaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan penataan perumahan melalui pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, dan penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah. Selanjutnya untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan (PMK) Tahun 2008 kepada 45 LPMK se Kota Yogyakarta dengan dana sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non fisik antara lain berupa perbaikan jalan, conblok, saluran air hujan, saluran air limbah dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat. Terkait dengan penanganan kebakaran, telah diambil langkah-langkah berupa penyediaan dan perbaikan sarana pemadam kebakaran, peningkatan ketrampilan bagi petugas pemadam kebakaran serta sosialisasi cara penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran.

Penataan pemukiman terkait erat dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih, PDAM Tirta Marta sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan membuat sumur dalam di Gondokusuman dan Bener, pembangunan Instalasi Pengolahan Air di tiga reservoir besar yang melayani Kota Yogyakarta, serta pelayanan distribusi air kepada pelanggan selama 24 jam. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akan air minum bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta, pada Tahun 2008 telah dilakukan pemasangan alat *Water Purifier* sebanyak 40 buah pada MCK ditengah-tengah perkampungan tersebar se Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai penjernih air sehingga air siap minum dan memenuhi syarat kesehatan.

Pelaksanaan urusan perumahan pada Tahun 2008 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Persatuan Air Minum Indonesia (PERPAMSI) Award dari Bapak Wakil Presiden RI kepada PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagai PDAM terbaik kategori sedang.

2.2.8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa :

- Memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi kepemudaan.
- Mendorong perkembangan olahraga di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan berbagai event olah raga serta memberikan bantuan bagi atlet berprestasi.

2.2.9. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperbaiki iklim usaha dan investasi di Kota Yogyakarta, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan, penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupun menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi.

Untuk optimalisasi dan pengembangan potensi investasi dalam rangka mengantisipasi krisis keuangan global yang terjadi pada akhir Tahun 2008 yang dapat berdampak pada kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, telah disusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi Pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta yang mulai diberlakukan pada Tahun 2009, di mana Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan insentif kepada investor yang mendirikan usaha baru pada Tahun 2009.

2.2.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp. 2.125.954.000.000,00 (dua triliun seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2008 telah menyediakan fasilitas website secara gratis bagi para pengusaha yang bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan membantu publikasi dan sarana promosi agar usaha mereka lebih dikenal masyarakat, bahkan hingga lingkup internasional. Dengan adanya

website ini setidaknya lebih dari 75 UMKM yang ada di Kota Yogyakarta bisa menggunakan fasilitas tersebut. Di samping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menghimbau kepada para pemilik/pengelola mall untuk lebih peduli pada pengembangan usaha kecil menengah dengan memberikan space yang lebih banyak sebagai ajang pameran produk usaha kecil menengah.

Upaya-uaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah berdampak pada volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun 2008 yang mencapai 7.199,18 ton dengan nilai US\$ 31.135.888,52 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh dua dolar) atau mengalami peningkatan dibanding Tahun 2007 yang mencapai US\$ 26.063.497,34 (dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh empat).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas koperasi agar dapat berkembang secara sehat, sejak Tahun 2004 Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 993.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan modal pinjaman lunak bagi koperasi dan UKM. Bantuan modal kepada setiap koperasi maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk setiap UKM maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Melalui pembinaan ini sebanyak 436 koperasi dapat menjalankan usahanya dengan baik atau merupakan koperasi aktif, sedangkan 103 koperasi masih memerlukan pembinaan lebih lanjut atau merupakan koperasi pasif. Di samping itu telah pula dibangun gedung pusat Pengembangan UKM di Jalan Tamansiswa, UPT Cor Logam dan pembangunan bertahap Pusat Seni dan Kerajinan Yogyakarta (PSKY) di Umbulharjo sebagai realisasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana pendukung yang memadai.

2.2.11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Masalah yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat melengkapi dirinya dengan identitas kependudukan maupun akte kelahiran. Dilihat dari jumlah wajib KTP yang telah mempunyai KTP, ternyata masih belum seperti yang diharapkan, yaitu baru mencapai 89,87%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk, maupun kepemilikan Kartu Identitas Anak. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan program penataan administrasi kependudukan yang telah dilakukan pada Tahun 2008 antara lain adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi 346.957 wajib KTP dan penerbitan 15.442 akte-akte catatan sipil. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota dan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut, telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di 14 kecamatan, percepatan pembaharuan data base kependudukan yang akurat dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta penerapan sistem kependudukan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Selanjutnya dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, transparan, berkepastian hukum dan adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007.

2.2.12. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian kita bersama adalah terkait dengan masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia serta rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebanyak 437.121 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 33.822 orang atau 7,38% merupakan pengangguran. Keadaan ini dipicu oleh meningkatnya pencari kerja baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Selain itu, masih besarnya jumlah dan prosentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah penganggur yang berpendidikan SLTA ke bawah yaitu sebanyak 26.190 orang atau 77,43% dari jumlah penganggur. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja.

2.2.13. Urusan Ketahanan Pangan

Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah "Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau". Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks melibatkan peran lintas sektor dengan penanganan secara multi disiplin. Indikator ketahanan pangan suatu wilayah ditandai dengan : ketersediaan (pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk dalam volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi), distribusi pasokan pangan merata ke seluruh wilayah, harga stabil dan terjangkau secara berkelanjutan) dan konsumsi (rumah tangga mampu mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan).

Sesuai pengertian dan indikator ketahanan pangan tersebut di atas, permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lain dalam hal penganeekaragaman pangan menuju gizi seimbang, keamanan pangan, alih fungsi lahan pertanian dan konservasi lahan dan air serta pengembangan infrastruktur berupa tidak tersedianya sumber air yang mencukupi untuk pengembangan usaha tani, peternakan dan perikanan budi daya.

2.2.14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya berbagai kegiatan, antara lain workshop internal lembaga pembebi layanan kepada korban kekerasan, workshop penyusunan data kasus kekerasan berbasis gender, penyusunan model dan tahapan pencegahan kasus kekerasan berbasis gender, workshop penyusunan draft Raperda dan Uji Publik penanganan korban kekerasan, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender, diklat peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, sosialisasi kegiatan model kota yang layak bagi anak serta workshop peningkatan pelayanan untuk kelompok difabel.

2.2.15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah masih tingginya angka kelahiran total di Kota Yogyakarta, masih terdapatnya keluarga pra sejahtera, kesertaan pria dalam ber-KB masih sangat rendah, prosentase pasangan usia subur unmetned masih tinggi (14,53%) dan pencapaian peserta Keluarga Berencana baru yang masih di bawah target yaitu baru mencapai 78,59%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan optimalisasi pertemuan-pertemuan pembinaan di wilayah dalam rangka meningkatkan program Keluarga Berencana, koordinasi Tri Komponen, pembinaan kader Keluarga Berencana, pembinaan keluarga pra sejahtera serta pemberian bantuan dan ketrampilan bagi keluarga pra sejahtera, kerjasama dengan tempat-tempat pelayanan Keluarga Berencana swasta yan diprioritaskan untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta pelayanan Keluarga Berencana melalui pelatihan/pemasangan IUD dan implan bekerja sama dengan Akademi Kebidanan.

Dalam pelaksanaan keluarga berencana telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan KB dan Keluarga Sejahtera. Dari kegiatan tersebut, diketahui bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengikuti program KB relatif baik. Jumlah PUS di Kota Yogyakarta yang mengikuti program KB sebanyak 35.090 pasangan atau 72,05% dari seluruh PUS. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu, keikutsertaan Keluarga Pra Sejahtera dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing telah berjalan baik.

2.2.16. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pembangunan dan pelebaran jalan sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan serta masih terbatasnya sarana jalan sehingga berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2008 terjadi 618 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 7 orang, luka berat 69 orang dan luka ringan 379 orang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008, telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada 60 simpang. Dari 60 simpang tersebut, 38 simpang atau 63% sudah memakai lampu jenis LED yang bermanfaat untuk mendukung kelancaran lalu lintas serta usia teknis lebih panjang dan lebih terang dari lampu biasa, 31 simpang atau 52% telah dilengkapi dengan Counter Down yang bermanfaat untuk mendukung keselamatan lalu lintas dan menambah kapasitas simpang, serta 8 simpang sudah menggunakan tenaga surya yang memiliki manfaat dan kelebihan antara lain tidak tergantung tenaga listrik dan faktor kerusakan lebih kecil karena menggunakan Direct Current (DC)/ arus searah. Kegiatan lain berupa pemeliharaan dan perbaikan 103 rambu dari 4.056 rambu lalu lintas yang tersebar di seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta, pemeliharaan dan perawatan marka jalan melalui pengecatan 600 m² marka jalan dari keseluruhan 34.320 m² marka jalan, survey lalu lintas serta optimalisasi pelaksanaan siaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan ikut memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara, kemacetan lalu lintas serta tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi teknis kendaraan. Terkait dengan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap enam bulan sekali kendaraan wajib melakukan pengujian. Dari 15.469 kendaraan pendaftar uji, sebanyak 15.398 kendaraan atau 99,54% telah memenuhi kewajibannya melakukan pengujian dan 71 kendaraan atau 0,54% tidak datang melakukan uji. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.924 kendaraan dinyatakan lulus uji atau laik jalan dan 474 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam bidang perhubungan dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi DIY memfasilitasi penyediaan sarana angkutan umum massal berupa bus Trans Jogja. Di samping untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat akan

sarana transportasi, kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum. Upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Kota Yogyakarta mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan personil Dinas Perhubungan membantu mengatur arus lalu lintas dan menyeberangkan para siswa di sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat lalu lintas.

2.2.17. Urusan Komunikasi dan Informasi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan komunikasi dan informasi adalah sarana dan prasarana komunikasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi maupun kebutuhan untuk menjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik melalui pameran, acara Wlikota Menyapa sebanyak 416 kali, penerbitan Media Info Kota sebanyak 150.000 eksemplar dalam 10 edisi masing-masing 15.000 eksemplar setiap edisi yang didistribusikan sampai ke tingkat RT dan RW, penerbitan majalah Ayodya sebanyak 7.000 eksemplar, serta informasi melalui poster, baliho, spanduk, videotron maupun leaflet. Selanjutnya untuk lebih memperlus penyebaran informasi melalui Media Info Kota, Pemerintah Kota Yogyakarta mendirikan Papan Baca Media Info Kota di setiap Kelurahan. Media Info Kota diharapkan mampu menjadi media untuk penyebaran informasi serta menyatukan aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Pembuatan papan baca Media Info Kota ini dilaksanakan dengan bantuan dana Block Grant sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap RW.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, baik melalui dialog interaktif, penyebarluasan informasi melalui media massa, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas serta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan akhir Tahun 2008, sebanyak 140 unit kerja telah terjangkau internet. Melalui website www.jogjakota.go.id telah dibuat 15 sub domain yang secara rutin dilakukan up date data oleh 11 SKPD. Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 877 pengunjung per hari, 10.954 halaman per hari dan menggunakan bandwidth sebesar 0,4 GB per hari.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diinformasikan

kepada masyarakat. Di samping itu melalui media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan Walikota Award bidang media massa kepada lembaga, media massa dan insan pers yang secara nyata melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang bersih dan hijau.

2.2.18. Urusan Pertanahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, proses dialog dengan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut telah membawa hasil yaitu sebanyak 252 bidang telah bersertifikat dan 71 kekancingan (perjanjian pijam pakai tanah Kraton), serta 75 bidang dan 6 kekancingan sedang dalam proses penyelesaian di BPN Kota Yogyakarta dan Kraton.

2.2.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah masih tingginya angka kriminalitas dan angka penyakit masyarakat. Di samping itu, tingkat pelanggaran peraturan daerah juga masih relatif tinggi. Dari laporan Poltabes Kota Yogyakarta diketahui bahwa angka kejahatan konvensional mengalami peningkatan dari 1.070 laporan pada Tahun 2007 menjadi 2.270 laporan pada Tahun 2008. Kondisi ini merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dan perlu dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak agar kondisi stabilitas keamanan dan keertiban di Kota Yogyakarta tetap dapat dijaga dan dipertahankan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memelihara kondisi keamanan dan ketertiban Kota Yogyakarta melalui penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, baik secara represif yustisi maupun secara represif pro yustisi sebanyak 5.094 pelanggar. Jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada tahun 2008 telah berhasil mengajukan 797 pelanggar Peraturan Daerah ke sidang Pengadilan dan diperoleh hasil denda atas sidang pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke kas daerah sebesar Rp. 104.664.000,00 (seratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Penegakan Peraturan Daerah secara tegas bagi para pelanggar dimaksudkan agar

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan, disamping dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Selanjutnya dari hasil operasi penyakit masyarakat telah terjaring pelaku penyakit masyarakat sebanyak 1.657 orang. Dibandingkan dengan Tahun 2007 sebanyak 1.800 orang, jumlah penyakit masyarakat yang dijaring mengalami penurunan sebanyak 7,94%. Adapun penurunan ini menunjukkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan pekat semakin meningkat.

2.2.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam upaya terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), faktor penting yang perlu menjadi perhatian adalah standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional, serta sistem yang lebih komprehensif.

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, namun hasilnya masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan permasalahan dalam urusan pemerintahan umum. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur, belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang rima berdasarkan standar pelayanan minimal dan belum optimalnya penegakan aturan sistem dan prosedur kerja. Untuk itu upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain adalah penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Lisensi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat. Dalam Tahun 2008 telah berhasil diterbitkan 12 Peraturan Daerah, 108 Peraturan Walikota, 746 Keputusan Walikota dan 7 Instruksi Walikota. Hasil yang cukup menggembirakan adalah bahwa menurut survey Transparansi Internasional Indonesia (TTI), Kota Yogyakarta mempunyai indeks persepsi korupsi (IPK) yang tertinggi yaitu 6,43.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurani pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya pemberantasan korupsi sejalan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan kerjasama

dengan Kemertian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kerja sama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPKP Perwakilan Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti korupsi. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan E-Procurement sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2008. Sampai dengan akhir tahun 2008 penyedia barang/jasa yang melakukan registrasi secara online sebanyak 191, selanjutnya telah dilaksanakan pelelangan secara elektronik sebanyak 11 paket pekerjaan, pelatihan menggunakan aplikasi e-procurement bagi 126 penyedia barang/jasa dan 68 pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah menurunnya jumlah hasil temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawasda Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa umlah temuan mengalami penurunan dari 52 temuan dan pada Tahun 2007 menjadi 31 temuan pada tahun 2008 atau menurun 40,28%. Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, jumlah temuan mengalami penuruna dari 52 temuan pada Tahun 2007 menjadi 26 temuan pada Tahun 2008 atau menurun 50%.

Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa saat ini pada Dinas Perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan menyederhanakan jumlah dan jenis izin dari 35 jenis menjadi 29 jenis izin, melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu juga dilakukan penyederhaan terhadap persyaratan dan waktu proses perijinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan. Sampai dengan saat ini jumlah izin yang telah diterbitkan Dinas Perijizinan sebanyak 6.644 izin. Keberhasilan peningkatan pelayanan perizinan ini telah menarik perhatian dari berbagai daerah, yang ditandai dengan banyaknya tamu dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melakukan magang dan studi banding pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya dalam penguatan kelembagaan sekaligus implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota serta

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan. Penyusunan Peraturan Daerah tersebut telah didahului dengan kebijakan akademis. Pada awal tahun 2009 dilaksanakan penataan kelembagaan bagu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Tahun 2008 telah mendapatkan apresiasi pihak, antara lain :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI menganugerahkan Piala Citra Pelayanan Prima untuk Kinerja Layanan Publik kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Transparency International Indonesia (TII) memberikan skor tertinggi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota terbersih dari korupsi.

2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah, masyarakat dituntut berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terkait dengan hal tersebut, telah dialokasikan anggaran stimulan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dari dana stimulan pemberdayaan masyarakat yang telah disalurkan tersebut telah mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp. 980.307.609,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).

Selain itu, melalui pembangunan partisipatif oleh masyarakat telah diserap dana swadaya murni sebesar Rp. 17.714.085.671,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Di samping itu, pelaksanaan pembangunan juga didukung oleh peran dari stakeholder terkait melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Iimbangan dengan saran pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum, peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di 45 kelurahan serta fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang meruakan partisipasi aktif dari lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta.

2.2.22. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan dalam urusan sosial tersebut adalah dengan melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial, pelayanan penyandang masalah sosial pada panti sosial, menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian dari mereka diberikan bantuan tunai, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang cacat, terlantar dan lanjut usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti maupun sistem di luar panti.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan jaminan perlindungan sosial melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) Tahun 2008 dengan berbasis pada rumah tangga miskin sebanyak 24.427 KK yang terdiri dari 81.322 jiwa penduduk miskin di Kota Yogyakarta atau 18,31% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Di samping itu, melalui Program Raskin telah disalurkan beras kepada 19.681 rumah tangga miskin dengan harga jauh dibawah harga pasaran, yaitu Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Hal lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada keluarga miskin adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi 3.315 orang penduduk miskin di RSUD Wirosaban. Disamping itu dibangun pula fasilitas sarana prasarana fisik bangsal pelayanan rawat inap masyarakat miskin.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperbaiki kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya teratasi sebagai akibat krisis ekonomi dan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Kondisi ini berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Apabila dalam Tahun 2007 jumlah penduduk miskin mencapai 89.818, maka pada Tahun 2008 menurun menjadi 81.332 jiwa.

Melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial telah dilaksanakan pembinaan terhadap keluarga penyandang cacat, pembinaan anak jalanan, pembinaan lanjut usia potensial, bantuan kepada 504 orang kehabisan bekal, rekomendasi keringanan biaya rumah sakit kepada 811 orang serta pelayanan penyandang masalah sosial pada panti sosial. Terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam Tahun 2008 sebanyak 33 orang anak telah ditampung di panti asuhan dan 51 orang lansia telah ditampung di panti wredha yang telah diingkatkan sarana dan prasarananya seperti panti-panti yang lain. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah anak terlantar dan lansia terlantar. Ke depan diharapkan jumlah anak terlantar dan lansia yang dilayani pada panti dapat lebih ditingkatkan.

Untuk penanganan kemiskinan, khususnya pada kelompok miskin potensial dalam rangka rehabilitasi keluarga miskin sampai dengan Tahun 2008 sebanyak 1.400 keluarga miskin telah difasilitasi dengan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) pemberdayaan sosial. Di samping memberikan dukungan anggaran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui program pemberdayaan kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan optimalisasi kegiatan Napza Crisis Centre (NCC) dan Badan Narkotika Kota (BNK) serta pendampingan dan penguatan kegiatan kader gerakan anti NAPZA.

2.2.23. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya, belum optimalnya peran serta masyarakat, masih kurangnya pengembangan seni yang dapat mendukung pariwisata serta pertunjukan seni dan budaya yang belum optimal sehingga belum daya tarik wisatawan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan berbagai event pertival, lomba maupun gelar seni dan budaya. Upaya tersebut juga ditindaklanjuti dengan tematik pembangunan Tahun 2008 yaitu Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata. Makna Pariwisata Berbasis Budaya adalah kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan selaras sesuai dengan potensi yang ada berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadinigrat serta menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak dan daerah lain.

Telah dilakukan pula pemeliharaan bangunan monumental dan bersejarah antara lain pengecatan Benteng Kraton, Tugu, Tetenger Jumeneng HB IX di Kotagede, serta pengapuran dan pengecatan komplek Kraton. Untuk meningkatkan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata telah dilakukan pemasangan lampu dan pembangunan tugu pembatas jembatan pada jembatan Sayidan dan Jembatan Serangan.

2.2.24. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan statistik adalah adanya data yang harus diperoleh dari instansi vertikal yaitu Kantor Statistik Kota Yogyakarta serta mekanimse dan prosedur pengumpulan data yang harus dilalui membutuhkan proses dan waktu. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui koordinasi yang intensif dengan SKPD terkait khususnya dengan Kantor Statistik Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan

beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan di Kota Yogyakarta.

2.2.25. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Yogyakarta telah dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua SKPD memiliki petugas arsip, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip serta masih kurang dipahaminya tatacara dan metode penyimpanan arsip sehingga penataan maupun penyimpanannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan pembinaan kearsipan, penataan dan akuisisi arsip SKPD.

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memperhatikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam urusan kearsipan. Hal ini dapat dilihat dari trus dilaksanakannya penataan, penyelamatan dan akuisisi arsip di setiap SKPD serta akan dikembangkan kearsipan sebagai salah satu SKPD baru di Kota Yogyakarta.

Melalui pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana kearsipan telah dilakukan pengelolaan arsip di depo arsip, bimbingan teknis kearsipan bagi petugas kearsipan SKPD sejumlah 99 personil, pendampingan penanganan arsip di kecamatan dan kelurahan se Kota Yogyakarta serta melaksanakan monitoring penanganan arsip di 34 sekolah.

2.2.26. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan adalah belum lengkapnya koleksi buku bacaan berkualitas yang dimiliki baik dari jumlah buku maupun judul buku, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan daerah serta masih perlu ditingkatkannya kesadaran akan minat baca masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan rehab dan peningkatan kondisi gedung perpustakaan daerah sehingga cukup reprenstatif sebagai sarana belajar dan menambah wawasan bagi masyarakat, serta terus berupa meningkatkan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari jumlah buku maupun judul buku dan terus melakukan sosialisasi tentang perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Peningkatan pelaksanaan urusan perpustakaan terus dilakukan, baik sarana prasarananya maupun umlah koleksi buku. Saat ini perpustakaan daeah telah memiliki 7.368 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 14.614 eksemplar. Keberadaan perpustakaan daerah ini mendapat respon cukup baik dari masyarakat, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 6.200 orang pada Tahun 2007 menjadi 16.574 orang pada Tahun 2008 dan jumlah anggota perpustakaan yang mengalami peningkatan dari 254 orang pada Tahun 2007 menjadi 799 orang pada Tahun 2008.

2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kelautan dan perikanan adalah keterbatasannya lahan di Kota Yogyakarta untuk perikanan serta tidak memiliki kawasan pantai sebagai potensi kelautan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan urusan kelautan dan perikanan lebih diarahkan sebagai pemasaran usaha perikanan melalui Pengembangan Pasar Ikan Higienis.

Pelaksanaan urusan perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta telah berhasil menghasilkan produksi ikan air tawar sebanyak 6.315 kg. Usaha pemasaran melalui Pasar Ikan Higienis telah mulai dikenal dan berkembang sebagai pusat pemasaran komoditas perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta.

2.2.28. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, prosentase rata-rata penurunan luas lahan sawah per tahun sebesar 11%. Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri, perdagangan dan jasa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam Tahun 2008 telah dirumuskan dan dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan petani perkotaan dengan kegiatan pengukuhan kelembagaan kelompok tani, peningkatan pengetahuan bagi masyarakat, peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan pertanian, pendampingan promosi, pelayanan edukasi dan pengawasan mutu komoditas.

Pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta, walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian. Program dari urusan pertanian mendukung Kota Yogyakarta sebagai :

- Kota pendidikan dengan pelayanan edukasi pertanian, magang, PKL, penelitian konsultasi, coasistensi mahasiswa di laboratorium maupun UPT yang ada.
- Kota wisata dengan dibangunnya kawasan Bursa Agro Jogja serta wisata pendidikan di kebun pembibitan.

Di samping itu, pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Tahun 2008 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 29.591.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang pertanian dapat disampaikan sebagai berikut :

- Produksi padi 991 ton dan palawija 18 ton.
- Produksi aneka tanaman buah-buahan 11.418,66 kwintal.
- Produksi aneka tanaman obat/biofarmaka mencapai 2.045,02 kg.

- Fasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui pameran dan kontes hasil pertanian di Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis.

Pelayanan edukasi yang berupa magang, pelatihan, penelitian, PKL, coasistensi sejumlah 66 kelompok, maupun kunjungan konsultasi di wisata edukasi sejumlah lebih dari 10.000 orang dengan lokasi di kebun pembibitan, kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Penyakit dan Rumah Potong Hewan.

Dengan adanya peningkatan kegiatan dalam urusan pertanian, maka kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2007. Apabila pada Tahun 2007 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 312.716.800,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), maka pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.390.685.100,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah). Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan pembangunan pertanian dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi terus dilanjutkan.

2.2.29. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan potensi yang ada. Meskipun secara riil di Kota Yogyakarta tidak mempunyai hutan, namun urusan kehutanan tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Wujud perhatian itu dilaksanakan dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup di perkotaan yang sehat, indah, bersih, nyaman dan alami.

Urusan kehutanan antara lain dilaksanakan lewat program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Taman Kota dan pemeliharaan serta peningkatan jalur hijau.

2.2.30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Mengingat potensi energi dan sumber daya mineral di Kota Yogyakarta yang relatif kecil, maka urusan ini hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan di Kota Yogyakarta, yaitu upaya atau kebijakan yang mengarah pada pembinaan, pengawasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber energi dan sumber daya mineral.

2.2.31. Urusan Pariwisata

Kepariwisata di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya yang selalu dinamis.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan dan menggairahkan kembali kepariwisataan di Kota Yogyakarta terus dilakukan melalui inovasi dan

pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja, serta mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Yogyakarta serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya jawa dengan budaya nusantara dan asing.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan didukung program-program pada urusan lainnya, telah membawa hasil yang cukup menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 1.260.658 orang pada Tahun 2007 menjadi 1.753.712 orang pada Tahun 2008 atau meningkat 39,11%. Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan bertambahnya lama tinggal dan rata rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta. Apabila pada Tahun 2007 rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 2,01 hari, maka pada Tahun 2008 meningkat menjadi 2,39 hari atau meningkat 18,91%. Rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari 67,5% pada Tahun 2007 menjadi 71% pada Tahun 2008.

2.2.32. Urusan Industri

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan industri telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya pengembangan desain kerajinan, pelayanan promosi dan informasi bagi pengrajin serta kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pemasaran dan pengembangan industri di Kota Yogyakarta.

2.2.33. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah merebaknya pasar modern yang dikhawatirkan dapat menggusur keberadaan pasar tradisional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad untuk tetap mempertahankan kelestarian pasar tradisional serta menciptakan pasar tradisional yang bersih, nyaman dan hijau. Ke depan Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu ikon pariwisata di Kota Yogyakarta.

Di tengah modernisasi dengan merebaknya pasar modern, keberadaan pasar tradisional tetap akan dipertahankan, karena pasar tradisional ada sisi lain yang dapat ditemukan yaitu hubungan humanisme antara pengunjung dan penjual, keunikan di pasar tradisional tidak ditemui pada pasar modern. Selain itu telah dilakukan perbaikan dan rehab pasar serta pembangunan Pasar Tunjungsari.

2.2.34. Urusan Ketransmigrasian

Urusan ketransmigrasian di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Fasilitas Penempatan Transmigrasi.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan ketransmigrasian melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Fasilitas Penempatan Transmigrasi telah dilaksanakan pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran sebanyak 2 angkatan, pembekalan ketransmigrasian pada posyantrans/PTP2T sebanyak 4 kali, pembekalan ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta sebanyak 2 kali, rekrutmen dan pembinaan pengerahan transmigrasi 20 KIE Kelp dan 4 KEI massa, monitoring dan seleksi calon transmigran 356 orang, pembinaan pemantapan /perpindahan transmigran 38 KK dan monitoring ke daerah lokasi transmigrasi sebanyak 3 lokasi.

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan tingkat Propinsi DIY dan Pembangunan Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus seiring dan sejalan dengan pembangunan nasional.

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas pada tingkat nasional adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan keamanan Nasional
4. Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh Pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas pada tingkat propinsi DIY adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya luhur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui peningkatan profesionalisme dan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Keunggulan Ekonomi Lokal yang Kreatif melalui pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dan pengembangan jejaring
4. Peningkatan Pelayanan Publik melalui penataan kawasan dan peningkatan sarana prasarana

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam rencana aksi pada RPJMD 2007-2011 adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas;
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
5. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah;
8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan
10. Pengurangan Resiko Bencana

Isu-isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi prioritas harus ditangani baik pada tingkat nasional, propinsi dan kota secara substantif terdapat kesamaan. Berangkat dari Isu strategis dan masalah mendesak tingkat nasional tersebut dapat dijelaskan keterkaitannya pada tingkat propinsi dan kota sebagai berikut.

Tabel 2.2
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi DIY	Kota Yogyakarta
1.	Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya luhur	1. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas 3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia		4. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
3.	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan keamanan Nasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui peningkatan profesionalisme dan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan.	5. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih 6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4.	Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh Pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi	3. Peningkatan Keunggulan Ekonomi Lokal yang Kreatif melalui pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dan pengembangan jejaring.	7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah 8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
5.	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.	4. Peningkatan Pelayanan Publik melalui penataan kawasan dan peningkatan sarana prasarana.	9. Peningkatan Kualitas Lingkungan 10. Pengurangan Resiko Bencana

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2010 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Yogyakarta serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

3.1.1. Inflasi

Laju inflasi kota Yogyakarta pada triwulan IV Tahun 2008 sebesar 9,88% (yoy) atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2007 yang sebesar 7,99%. Kenaikan inflasi tersebut dipicu dengan adanya kenaikan harga minyak dunia yang terus merembet kenaikan harga minyak dalam negeri. Kenaikan harga minyak dalam negeri juga terus menyebabkan kenaikan harga barang lainnya termasuk bahan makanan. Inflasi tertinggi adalah pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 14,87%, disusul kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar yang sebesar 13,60% dan urutan selanjutnya adalah kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 9,40%. Namun demikian secara keseluruhan inflasi Kota Yogyakarta pada triwulan IV tersebut lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 11,06% (yoy).

Perkiraan inflasi pada akhir tahun atau triwulan IV (yoy) diperkirakan akan lebih rendah dari Tahun 2008. Hal ini disebabkan turunnya harga minyak dunia yang diikuti turunnya harga minyak nasional. Selain itu juga adanya dampak krisis keuangan global yang diperkirakan mulai merambah ke daerah-daerah termasuk ke kota Yogyakarta. Laju inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 7 - 9% (yoy).

3.1.2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada Tahun 2008 sebesar 4,73%. terlihat dari meningkatnya PDRB Tahun 2008 atas harga dasar konstan 2000 sebesar Rp.5.002.106.000.000,- (lima trilyun dua milyar seratus enam juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2007 mencapai Rp. 4.776.401.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus satu juta rupiah). Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008 paling tinggi disumbangkan oleh sektor bangunan sebesar 9,36%, sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 7,26% dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mencapai 5,07%,

PDRB Kota Yogyakarta pada Tahun 2008 menurut harga berlaku sebesar Rp.9.540.256.000.000,- (sembilan trilyun lima ratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/services sebesar Rp.2.305.051.000.000,- (dua trilyun tiga ratus lima milyar lima puluh satu juta rupiah) urutan ke dua sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp.2.125.954.000.000,- (dua trilyun seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) urutan ketiga sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.1.715.469.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus lima belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Pada Tahun 2009 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh ketiga sektor tersebut.

3.1.3. PDRB perkapita

PDRB perkapita Tahun 2008 atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita Tahun 2007 mencapai Rp.19.062.569,- (sembilan belas juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan pada Tahun 2008 menjadi Rp. 20.879.717 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

3.1.4. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2007 sebesar 250.362 orang yang bekerja sebanyak 215.841 orang dan pengangguran 34.521 orang. Pada Tahun 2008 jumlah angkatan kerja sebesar 256.164 orang atau tumbuh sebesar 9,02% dengan rincian yang bekerja sebanyak 218.911 orang dan penganggur 37.253 orang, penambahan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada dan cenderung penambahan penggunaan investasi bukan bersifat padat karya.

3.1.5. Investasi

Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta pada Tahun 2008 masih cukup diperhitungkan oleh para investor, hal ini dapat dilihat dari indikator meningkatnya nilai investasi secara keseluruhan . Investasi dalam negeri pada Tahun 2007 dari rencana sebesar Rp.1.110.555.670.000,- (satu trilyun seratus sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.744.466.290.000,- (tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada Tahun 2008 relatif stabil, yaitu ada rencana Rp.1.170.401.000.000,- (satu trilyun seratus tujuh puluh milyar empat ratus satu juta rupiah) terealisasi Rp.744.466.280.000,- (tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk investasi asing pada Tahun 2007 ada rencana investasi sebesar Rp.1.705.594.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) terealisasi Rp.1.316.322.000.000,- (satu trilyun tiga ratus enam belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2008 rencana investasi ada sebesar Rp.1.707.787.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) terealisasi Rp.1.337.589.000.000,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

3.1.6. Ekspor Daerah

Nilai ekspor pada Tahun 2007 sebesar US\$ 26.063.497,34 (dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga empat dolar) sedangkan pada Tahun 2008 sebesar US\$ 31.135.888,52 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima dua dolar) mengalami kenaikan sebesar 19,46%. Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi mebel kayu, kerajinan perak, kulit dan anyaman.

Dampak krisis finansial Amerika Serikat Tahun 2008 merambat sebagai efek domino ke negara lain khususnya yang memiliki hubungan bisnis dengan AS. Volume perdagangan dunia khususnya ke AS dan negara-negara eropa mengalami penurunan. Berkaitan dengan situasi tersebut diharapkan pada Tahun 2009 nilai ekspor daerah diharapkan tetap sama dengan Tahun 2008.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Melihat perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2008, proyeksi perekonomian 2009 dan dampak krisis keuangan yang kemungkinan baru memasuki fase pemulihan maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut.

3.2.1. Tantangan

Pada tahun dua tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kota Yogyakarta masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran lokomotif ekonomi pendidikan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.
- Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.2.2. Prospek perekonomian 2010 dan 2011

Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2008 dan perkiraan 2009 serta tantangan yang dihadapi pada mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah: Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga, menyediakan infrastruktur perekonomian kota untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Prospek perekonomian pada Tahun 2010 dan 2011 dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 diperkirakan akan mengalami perbaikan setelah pada Tahun 2009 mengalami perlambatan akibat krisis keuangan global, dengan pemerintahan yang baru terpilih perekonomian pada Tahun 2010 perekonomian diharapkan dapat kembali tumbuh di atas 5,03%, dan Tahun 2011 diharapkan dapat tumbuh 6%;
- Inflasi pada Tahun 2010 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 6 -7% dan turun pada Tahun 2011 menjadi sekitar 6-7%.
- Nilai ekspor pada Tahun 2010 diperkirakan sebesar USD 9,66 miliar dan Tahun 2011 sebesar USD10,57 miliar.
- Jumlah kunjungan wisatawan yang pada Tahun 2010 diperkirakan mencapai 1,63 juta orang dan Tahun 2011 mencapai 1,64 juta orang.
- Dengan kondisi di atas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2010 - 2011 diharapkan dapat ditekan dibawah 10%;

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2010 mendasarkan pada perkembangan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, serta tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut.

- **Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKMK, fasilitasi promosi produk-produk industri, promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.**
- **Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata terus dilakukan dengan mendorong sektor sektor ekonomi seperti hotel, restoran, perdagangan, komunikasi, transportasi, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor**

ekonomi unggulan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan pematapan ikon-ikon pariwisata dan pendidikan sebagai lokomotif perekonomian.

- Peningkatkan peluang investasi dan peningkatan fasilitas untuk pengembangan produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi ekspor. Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota. Peningkatan ekspor dilakukan dengan diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah tinggi. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses pemasaran, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif atau industri gaya hidup.
- Mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan, dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas tenaga kerja, mengintensifkan pengawasan perusahaan, pemberdayaan lembaga bipatrit, serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. Selain itu juga dilakukan dengan memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD maupun AKAN.

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Yogyakarta

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	PDRB				
	• Harga Berlaku (Jutaan Rp)	8.599.468	9.540.256	10.499.701	12.255.198
	• Harga Konstan (Jutaan Rp)	4.776.401	5.002.105	5.238.097	5.491.946
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,46	4,73	4,72	4,85
3.	Jumlah Penduduk Miskin	89.818	81.344	77.276	73.412
4.	Tingkat Pengangguran	34.521	37.253	39.115	41.070
5.	Disparitas Pendapatan				

	Regional yang dilihat dari perbedaan				
	• Pendapatan perkapita	19.062.569	20.879.717	21.923.000	23.019.000
	• Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	78,2	78,2	78,3	78,4
6.	besaran rasio dan perbandingan-perbandingan				
	• Pajak Daerah terhadap PDRB	0,006	0,006	0.006	0.006
7.	Perbandingan penerimaan pemerintah daerah terhadap PDRB				
	• PAD	114.098.350.942	132.431.571.515	135.106.762.000	155.367.000.000
	• Dana Perimbangan	439.159.224.538	504.741.154.863	507.652.774.630	537.273.467.349

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini adalah diambil kebijakan sebagai berikut :

- Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- Dana Perimbangan yaitu DAU dan DAK sementara mempertimbangkan angka Tahun 2009.
- Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

3.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3.4.1.2. Dana Perimbangan

Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran belanja termasuk dana perimbangan, sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah, pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- Hibah, berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri, Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat;
- Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Adapun realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

No.	Jenis Pendapatan	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
1	PENDAPATAN DAERAH	615.648.852.480,31	720.252.933.347,72	703.966.546.530	761.490.415.176	767.189.935.935
1.1	Pendapatan Asli Daerah	114.098.350.942,31	132.431.571.514,72	135.106.762.000	155.367.000.000	161.066.520.759
1.1.1	Pajak Daerah	54.783.202.892,00	62.452.770.490,00	66.961.500.000	77.683.500.000	80.533.260.380
1.1.2	Retribusi Daerah	29.197.446.013,00	34.940.602.210,00	21.413.989.000	24.858.720.000	25.770.643.321
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.783.239.359,78	8.454.823.854,45	8.454.821.000	9.322.020.000	9.663.991.246
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	21.334.442.677,53	26.583.374.960,27	38.276.452.000	43.502.760.000	45.098.625.813
1.2	Dana Perimbangan	439.159.224.538,00	504.741.154.863,00	507.652.774.630	537.273.467.349	537.273.467.349
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.329.224.538,00	61.245.922.863,00	56.810.144.630	71.277.854.203	71.277.854.203
1.2.2	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	411.257.232.000,00	414.351.630.000	428.386.470.431	428.386.470.431
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	32.238.000.000,00	36.491.000.000	37.609.142.714	37.609.142.714
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi					
1.3	Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH	62.391.277.000,00	83.080.206.970,00	61.207.009.900	68.849.947.827	68.849.947.827
1.3.1	Hibah	6.288.730.100,00	20.332.060.000,00	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat		962.407.471,00	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.579.816.500,00	43.333.111.500,00	46.165.345.300	51.637.460.870	51.637.460.870
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.917.756.400,00	5.140.227.999,00	929.264.600	1.376.998.957	1.376.998.957
1.3.5	Dana Penyesuaian Ad Hoc					
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	15.604.974.000,00	13.312.400.000,00	14.112.400.000	15.835.488.000	15.835.488.000

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (*obligasi daerah*).

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	90.610.460.325,97	134.768.116.022,80	125.764.305.705	95.000.000.000	90.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	125.892.112,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.610.460.325,97	134.894.008.134,80	125.764.305.705	95.000.000.000	90.000.000.000

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

3.4.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2009 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2010 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 diacu dalam RKPD ini dan dituangkan dalam RAD. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah:

- Percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi
- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia
- Pemantapan Reformasi Birokrasi dan hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan keamanan Nasional
- Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh Pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi
- Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3.4.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga.

Realisasi belanja dan perkiraan belanja dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pada kelompok belanja tidak langsung di proyeksikan antara 1-5% dan kenaikan pada kelompok belanja langsung diasumsikan naik antara 1-5%.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Belanja Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

No.	Jenis Belanja	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
2	BELANJA DAERAH	569.120.372.561,96	698.566.664.120,78	824.037.522.938	813.990.415.176	854.689.935.935
2.1	Belanja Tidak Langsung	324.993.963.073,96	415.300.348.549,04	485.047.565.436	478.778.428.136	502.717.349.543
2.1.1	Belanja pegawai	263.728.387.186,00	342.891.947.474,00	403.319.206.341	403.319.206.341	423.485.166.658
2.1.2	Belanja bunga	707.120.553,55	579.027.616,04	459.221.795	459.221.795	482.182.885
2.1.3	Belanja subsidi	306.876.000,00		-	-	
2.1.4	Belanja hibah		22.180.860.900,00	33.067.782.150	40.000.000.000	42.000.000.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	57.696.628.060,00	49.587.684.559,00	40.201.355.150	30.000.000.000	31.500.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.554.951.274,41	60.828.000,00	8.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000
2.2	Belanja Langsung	244.126.409.488,00	283.266.315.571,74	338.989.957.502	335.211.987.040	351.972.586.392
2.2.1	Belanja Pegawai	68.476.752.847,00	85.279.523.295,60	85.414.320.061	83.802.996.760	87.993.146.598
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.667.260.473,00	90.700.730.390,14	155.273.523.301	150.845.394.168	158.387.663.876
2.2.3	Belanja Modal	89.982.396.168,00	107.286.061.886,00	98.302.114.140	100.563.596.112	105.591.775.918

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup defisit. Realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	12.000.000.000,00	-	2.500.000.000	2.500.000.000
	Pembayaran pokok utang	958.824.221,52	982.962.288,20	4.500.000.000	40.000.000.000	
	Pemberian pinjaman daerah	1.412.000.000,00	-	1.193.329.297	-	
		-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	2.370.824.221,52	12.982.962.288,20	5.693.329.297	42.500.000.000	2.500.000.000

3.4.5. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi realisasi dan proyeksi kerangka pendanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

No.	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	615.648.852.480,31	720.252.933.347,72	703.966.546.530	761.490.4415.176	767.189.935.935
1.1	Pendapatan Asli Daerah	114.098.350.942,31	132.431.571.514,72	135.106.762.000	155.367.000.000	161.066.520.759
1.1.1	Pajak Daerah	54.783.202.892,00	62.452.770.490,00	66.961.500.000	77.683.500.000	80.533.260.380
1.1.2	Retribusi Daerah	29.197.466.013,00	34.940.602.210,00	21.413.989.000	24.858.720.000	25.770.643.321
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.783.239.359,78	8.454.823.854,45	8.454.821.000	9.322.020.000	9.663.991.246
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang sah	21.334.442.677,53	26.583.374.960,27	38.276.452.000	43.502.760.000	45.098.625.813
1.2	Dana Perimbangan	439.159.224.583,00	504.741.154.863,00	507.652.774.630	537.273.467.349	537.273.467.349
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.329.224.538,00	61.245.922.863,00	56.810.144.630	71.277.854.203	71.277.854.203
1.2.2	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	411.257.232.000,00	414.351.630.000	428.386.470.431	428.386.470.431
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	32.238.000.000,00	36.491.000.000	37.609.142.714	37.609.142.714
1.3	Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH	62.391.277.000,00	83.080.206.970,00	61.207.009.900	68.849.947.827	68.849.947.827
1.3.1	Hibah	6.288.730.100,00	20.332.060.000,00	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat		962.407.471,00	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.579.816.500,00	43.333.111.500,00	46.165.345.300	51.637.460.870	51.637.460.870

No.	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.917.756.400,00	5.140.227.999,00	929.264.600	1.376.998.957	1.376.998.957
1.3.5	Dana kontinjensi/dana ad hoc					
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.604.974.000,00	13.312.400.000,00	14.112.400.000	15.835.488.000	15.835.488.000
	Jumlah Pendapatan	615.648.852.480,31	720.252.933.347,72	703.966.546.530	761.490.415.176	767.189.935.935
2	BELANJA DAERAH	569.120.372.561,96	698.566.664.120,78	824.037.522.938	813.990.415.176	854.689.935.935
2.1	Belanja Tidak Langsung	324.993.963.073,96	415.300.348.549,04	485.047.565.436	478.778.428.136	502.717.349.543
2.1.1	Belanja Pegawai	263.728.387.186,00	342.891.947.474,00	403.319.206.341	403.319.206.341	423.485.166.658
2.1.2	Belanja Bunga	707.120.553,55	579.027.616,04	459.221.795	459.221.795	482.182.885
2.1.3	Belanja Subsidi	306.876.000,00		-	-	
2.1.4	Belanja Hibah		22.180.860.900,00	33.067.782.150	40.000.000.000	42.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.696.628.060,00	49.587.684.559,00	40.201.355.150	30.000.000.000	31.500.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa			-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa			-		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.554.951.274,41	60.828.000,00	8.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000
2.2	Belanja Langsung	224.126.409.448,00	283.266.315.571,74	338.989.957.502	335.211.987.040	351.972.586.392
2.2.1	Belanja Pegawai	68.476.752.847,00	85.279.523.295,60	85.414.320.061	83.802.996.760	87.993.146.598
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.667.260.473,00	90.700.730.390,14	155.273.523.301	150.845.394.168	158.387.663.876
2.2.3	Belanja Modal	89.982.396.168,00	107.286.061.886,00	98.302.114.140	100.563.596.112	105.591.775.918
	Jumlah Belanja	569.120.372.561,96	698.566.664.120,78	824.037.522.938	813.990.415.176	854.689.935.935

No.	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6	7
	Surplus/Defisit	46.528.479.918,35	21.686.269.226,94	(120.070.976.408)	(52.500.000.000)	(87.500.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	90.610.460.325,97	134.894.008.134,80	125.764.305.705	95.000.000.000	90.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	90.610.460.325,97	134.768.116.022,80	125.764.305.705	95.000.000.000	90.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	125.892.112,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.610.460.325,97	134.894.008.134,80	125.764.305.705	95.000.000.000	90.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.370.824.221,52	12.982.962.288,20	5.693.329.297	42.500.000.000	2.500.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	12.000.000.000,00	4.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	958.824.221,52	982.962.288,20	1.193.329.297	40.000.000.000	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.412.000.000,00	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.370.824.221,52	12.982.962.288,20	5.693.329.297	42.500.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto	88.239.636.104,45	121.911.045.846,60	120.070.976.408	52.500.000.000	87.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	134.768.116.022,80	143.597.315.073,54	-	-	-

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya perencanaan pembangunan di daerah mengacu dan berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan perencanaan pembangunan pemerintah di atasnya. Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta dalam hal ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah sebagai berikut : *Pertama*, Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; *Kedua* : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; *Ketiga* : Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; *Keempat* : Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh Pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan *Kelima* : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim

Prioritas pembangunan Provinsi DIY adalah sebagai berikut : *Pertama* : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya luhur; *Kedua* : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui peningkatan profesionalisme dan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan; *Ketiga* : Peningkatan Keunggulan Ekonomi Lokal yang Kreatif melalui pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dan pengembangan jejaring; *Keempat* : Peningkatan Pelayanan Publik melalui penataan kawasan dan peningkatan sarana prasarana.

Prioritas pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 selian itu juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY, juga dirumuskan berdasarkan tematik pembangunan daerah, hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2008 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2009; masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2010. Adapun urutan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
4. Pengurangan Resiko Bencana
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
6. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prioritas pembangunan Tahun 2010 tersebut , selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran, kebijakan dan program pembangunan.

1. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 76% menjadi 78%.
- b. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 56,94% menjadi 60,97%.
- c. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%.
- d. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,779 menjadi 0,7895
- e. Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 64% menjadi 72%.
- f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%
- g. Peningkatan standar sanitasi *hygiene* unit usaha dari 44 (empat puluh empat) unit menjadi 54 (lima puluh empat) unit.
- h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah sebagai berikut :

- a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan), surveillance serta monitoring kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.
- c. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.
- c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

- d. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit.
- e. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
- f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah.
- g. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan.
- h. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan sarana prasarana berkualitas yaitu:

- a. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 67% menjadi 84%.
- b. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 13,4% menjadi 15,7%.
- c. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman sebesar 2% dan meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni dari 94% menjadi 96%
- d. Meningkatnya penerangan jalan umum sebanyak 18.000 titik.
- e. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 78% menjadi 84%.
- f. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 78% menjadi 84%.
- g. Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 78% menjadi 84%.
- h. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 78% menjadi 84 %.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan sarana dan prasarana berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta.
- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik termasuk keamanan atas resiko bencana
- c. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.
- e. Meningkatkan dukungan lingkungan terhadap perwujudan Yogyakarta kota sehat

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan.
- b. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- c. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- d. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
- e. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan.
- f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
- g. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas.
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Sasaran yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah:

- a. Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61,82% menjadi 63%.
- b. Meningkatkan cakupan layanan persampahan dari 81,94% menjadi 83%.
- c. Meningkatkan cakupan layanan air limbah dari 21,91% menjadi 23%.
- d. Mempertahankan perbandingan luas RTH dengan luas wilayah sebesar 26,8%.
- e. Peningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar sesuai kebutuhan 87% menjadi 90%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan kualitas lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
- b. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar permukiman dan perkotaan
- c. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
- e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan surveillance serta monitoring kesehatan

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah.
- d. Program Pengelolaan RTH.
- e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah

4. Pengurangan Risiko Bencana

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pengurangan risiko bencana adalah:

- a. Meningkatkan respon time penanganan bencana dari 120 (seratus dua puluh) menit menjadi 90 (sembilan puluh) menit.
- b. Meningkatkan respon time petugas pemadam kebakaran dari 13 (tiga belas) menit menjadi 12 (dua belas) menit.
- c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%.
- d. Berkurangnya genangan air dari 74 (tujuh puluh empat) titik menjadi 64 (enam puluh empat) titik

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut :

- a. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat
- b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal
- c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
- d. Berkurangnya faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi
- e. Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana
- f. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.
- b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
- c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan.
- d. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran yang akan dicapai dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah:

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu.
- b. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 47% menjadi 52%.
- c. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%.
- d. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,94% menjadi 5,86%.

- e. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%.
- f. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%.
- g. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%.
- h. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68%.
- i. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 (empat belas) menjadi 13 (tiga belas).
- j. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah).
- k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 Tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau
- b. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Berbagai Kelompok Masyarakat
- c. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi
- d. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada lima kelompok masyarakat yaitu: perempuan; anak; lansia; penduduk miskin dan defabel
- e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan surveillance serta monitoring kesehatan
- f. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi
- g. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik
- h. Meningkatkan Fungsi Kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel serta Pengarusutamaan Gender.
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

- h. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat
- i. Program Keluarga Berencana.
- j. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK
- k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

6. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 27,98% menjadi 51%, meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89%, meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90%. Serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 62% menjadi 68%.
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 92% menjadi 95%.
- c. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 4% menjadi 6%.
- d. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%
- e. Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%
- f. Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4%
- g. Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
- c. meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari keluarga, tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal Taman Kanak-Kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input sumber daya manusia yang berkualitas
- d. meningkatnya kualitas dan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan
- e. meningkatnya sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui approach, method, and technique/pendekatan, metode dan teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritua (SQ);
- f. memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam kurikulum pembelajaran formal maupun nonformal.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah sebagai berikut : Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek: lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah
- b. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual
- c. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana.
- b. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal.
- c. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan.
- d. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan.
- e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.
- g. Program Fasilitasi Olah Raga

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah:

- a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95%. Ketersediaan regulasi perizinan dari 56,57% menjadi 65%.
- b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah).
- c. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%.
- d. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%.
- e. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53%.
- f. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 (seratus dua puluh empat) kelompok menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 (satu) kelompok menjadi 3 (tiga) kelompok, kelas madya dari 17 (tujuh belas) kelompok menjadi 18 (delapan belas) kelompok, kelas lanjut dari 31 (tiga puluh satu) kelompok menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelompok, kelas pemula dari 75 (tujuh puluh lima) kelompok menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok.
- g. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 83,9% menjadi 86%. keamanan dari 88,9% menjadi 91%, kebersihan >30' menjadi <30').
- h. Peningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%.
- i. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%.
- j. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79,4% menjadi 83,4%.
- k. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0.5%.

- l. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut ::

- a. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan
- b. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- c. Mengembangkan iklim usaha dan investasi
- d. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata
- e. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
- f. Meningkatkan Manajemen Pembangunan
- g. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif
- h. Meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK.
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- d. Program Peningkatan Perdagangan.
- e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
- f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan.
- g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar.
- h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.
- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah.
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah.
- l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan.

8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu:

- a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 orang menjadi 1.750.000 orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,4 hari.
- b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya.
- c. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.
- b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan / akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.
- c. Meningkatkan Manajemen Pembangunan
- d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah maupun pengembangan penyediaan fasilitas publik
- e. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan
- f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan perkotaan
- g. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata, Perjuangan, dan Budaya.
- h. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- i. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata
- j. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjadi dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
- k. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik
- l. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan surveillance serta monitoring kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pariwisata.
- b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya.
- c. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah:

- a. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%.
- b. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%.

- c. Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 85% menjadi 90%. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87% menjadi 92%.
 - d. Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5,76% menjadi 5%.
 - e. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89%.
 - f. Meningkatkan kesesuaian dengan kebutuhan dari 77,08% menjadi 82%.
- Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pencegahan korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- d. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- e. Meningkatkan manajemen pembangunan khususnya dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah.
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Hukum.
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
- f. Program Peningkatan Kualitas SDM.
- g. Program Peningkatan Kehidupan Beragama

10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sasaran yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100%.
- b. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79%.

- c. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40% menjadi 100% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%.
- d. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78% menjadi 82%.
- e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 85% menjadi 89%.
- f. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 85,5% menjadi 89%.
- g. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%.
- h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%.
- i. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%.
- j. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 78,5% menjadi 80%.
- k. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%.
- l. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%.
- m. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88%.
- n. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89%.
- o. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 75% menjadi 83%.
- p. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71,16% menjadi 73%.
- q. Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 84% menjadi 86%.
- r. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89%.
- s. Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66,67% menjadi 72%.
- t. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%.
- u. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%.
- v. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89%.
- w. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 87% menjadi 88%

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diambil kebijakan:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik.

- b. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.
- c. Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku..
- d. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.
- f. Meningkatkan manajemen pembangunan.
- g. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- x. .

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Perkantoran.
- b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian.
- c. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU.
- d. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah.
- f. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah.
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa.
- j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.
- k. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
- l. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan.
- m. Program Pengembangan Data dan Informasi.
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan, Keuangan, dan Administrasi Pemkot.
- o. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan.
- q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan.
- r. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD.
- s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- u. Program Penelitian dan Pengembangan.
- v. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
- w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun prioritas pembangunan selengkapnya beserta sasaran, program, pagu indikatif dan SKPD yang mengampu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	Pagu Indikatif	SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
1	Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 76% menjadi 78%	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	2.786.000.000	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 56,94% menjadi 60,97%	Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	664.000.000	Dinas Kesehatan
		Berkurangnya ancaman/terkendalnya penyakit potensi wabah sebesar 6%	Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	2.587.000.000	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,779 menjadi 0,7895	Program Pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit	10.230.000.000	Dinas Kesehatan, RSUD
		Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 64% menjadi 72%	Program regulasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan	977.000.000	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Layanan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 58 % menjadi 59 %	Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.320.000.000	Dinas Kesehatan
		Terkendalnya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 menjadi 13	Program Keluarga Berencana	258.000.000	Kantor Keluarga Berencana

2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas	Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 13,4% menjadi 15,7%	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.752.000.000	Dinas Kimpraswil
		Meningkatnya penerangan jalan umum sebanyak 18.000 titik	Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8.157.000.000	Dinas Kimpraswil
		Berkurangnya genangan air dari 62 titik menjadi 54 titik	Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase	5.710.000.000	Dinas Kimpraswil
		Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 83% menjadi 84%	Program Pengembangan Kinerja Persampahan	3.250.000.000	Badan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 23% menjadi 24%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	3.000.000.000	Dinas Kimpraswil
		Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman sebesar 2% dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 94% menjadi 96%	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	3.190.000.000	Dinas Kimpraswil
		Meningkatnya Produk rencana detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 67% menjadi 84%	Program Pengembangan Detail Tata Ruang dan Tata Bangunan	945.000.000	Dinas Kimpraswil
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 78% menjadi 84%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.967.000.000	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya presentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 78% menjadi 84%	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	750.000.000	Dinas Perhubungan

		Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 78% menjadi 84%	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas	750.000.000	Dinas Perhubungan
		Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 78% menjadi 84%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.303.000.000	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 89% menjadi 92%	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah	6.600.000.000	DBGAD
		Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelayananan proeur dari 89% menjadi 92%	Program Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	1.100.000.000	DBGAD
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 90,57% menjadi 92,87%	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah	51.321.000.000	DBGAD, Bagian Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 63% menjadi 64%	Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3.550.000.000	Badan Lingkungan Hidup
		Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 31,65%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.500.000.000	Badan Lingkungan Hidup
4	Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Respon Time dari 127,5 menit menjadi 90 menit	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	675.000.000	Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat

		Meningkatnya respon time dari 12 menit menjadi 11 menit	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	825.000.000	Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat
5	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 52% menjadi 56%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, defabel serta Pengarusutamaan Gender	1.550.000.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,9% menjadi 99,95%	Program Wajib Belajar 12 Tahun	12.365.000.000	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 98,5% menjadi 99,5%			
		Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebesar 2%	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	990.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 2%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.853.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 8,61% menjadi 10%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	1.260.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Menurunnya jumlah penganggur dari 5,86% menjadi 5,79%	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	915.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 51% menjadi 70,5%	Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana	19.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 88% menjadi 94%			
		Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 90% menjadi 95%			
		Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 68% menjadi 74%			
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 95% menjadi 97,5%	Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal	17.340.000.000	Dinas Pendidikan, Kantor Pengelola Taman Pintar
		Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 6% menjadi 8%	Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kunjung perpustakaan sebesar 60%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Meningkatkan prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%	Program Fasilitasi Olah Raga	750.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa
		Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4%	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	805.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa

		Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	128.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa
7	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah	Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 45% menjadi 43%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga tenaga Kerja	370.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.112 Milyar menjadi Rp.118 Milyar	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK	3.449.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
		Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 kelompok menjadi 131 kelompok terdiri dari : kelas utama yaitu dari 1 kelompok menjadi 3 kelompok, kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok, kelas lanjut dari 37 kelompok menjadi 39 kelompok, kelas pemula dari 83 kelompok menjadi 85 kelompok	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	595.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
		Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 66,45% menjadi 69.95%	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	312.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
		Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%	Program Peningkatan Perdagangan	3.073.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

		Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 85,9% menjadi 88%, Keamanan 90,9% menjadi 93%, Kebersihan <30 menjadi >30)	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	5.000.000.000	Dinas Pengelolaan Pasar
8	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya	Meningkatnya tingkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Yogyakarta dari 1.831.065 orang menjadi 2.151.939 dari 2,4 hari menjadi 2,45 hari	Program Pengembangan Pariwisata	3.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya kekayaan budaya yang terkelola dengan baik sebesar 18 nilai budaya	Pengembangan Nilai-nilai Budaya	1.320.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih	Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5% menjadi 4,9%.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	737.000.000	Inspektorat
10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 89% menjadi 92%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	845.000.000	Bappeda
		Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 86% menjadi 88%	Program Penelitian dan Pengembangan	350.000.000	Bappeda
		Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap, akurat) dari 88% menjadi 89%	Program Pengembangan Data dan Informasi	245.000.000	Bappeda

		Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 89% menjadi 92%	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	769.000.000	Bappeda, Bagian Pengendalian Pembangunan
		Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap, dan valid dari 83% menjadi 91%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.459.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 83% menjadi 84%	Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	385.000.000	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 86% menjadi 88%	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.749.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
		Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT,RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 72% menjadi 76%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	372.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu	355.000.000	
		Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 87% menjadi 91%	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	885.000.000	Bagian Hukum
		Meningkatnya penanganan sengketa / perkara hukum, permasalahan hukum dari 90% menjadi 95%	Program Peningkatan Pelayanan Hukum	1.312.000.000	Bagian Hukum
		Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 92% menjadi 96%			Bagian Hukum

		Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 89% menjadi 92%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	350.000.000	Bagian Organisasi
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 89% menjadi 92%	Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tangga Keuangan dan Administrasi Pemkot	313.000.000	Bagian Umum
		Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 83,4% menjadi 87,4%	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah	1.014.000.000	Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 89% menjadi 92%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	396.000.000	Bagian Protokol
		Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 80% menjadi 82%	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	582.000.000	Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
		Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 88% menjadi 90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.281.000.000	Bagian Teknologi Informasi dan Telematika, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi
		Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 88% menjadi 89%	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	100.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi

		Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 89% menjadi 92%	Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD	6.434.000.000	Sekretariat DPRD
		Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari 88% menjadi 89%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.445.000.000	Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
		Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.5%	Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah	3.379.000.000	Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 88 % menjadi 89 %	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	4.052.000.000	Dinas Ketertiban
		Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 95,61% menjadi 98%	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	1.089.000.000	Dinas Perizinan
		Ketersediaan regulasi perizinan dari 66,19% menjadi 74%			
		Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 78,96% menjadi 85%	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	1.553.000.000	BKD
		Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 82% menjadi 86%	Program Peningkatan Kualitas SDM	5.868.000.000	BKD, Dinas Ketertiban, Inspektorat
		Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 73% menjadi 75%	Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	1.000.000.000	Semua Kecamatan
		Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000.000	Semua SKPD
		Peningkatan Standar Sanitasi Hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit	Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan	355.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

					Koperasi dan Pertanian
		Terfasilitasinya Koordinasi Program Penyelenggraan Kesejahteraan Masyarakat dari 68 % menjadi 72 %	Program Fasilitas dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	380.000.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
		Meningkatnya bantuan fasilitas kehidupan beragama sebesar 2%	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	4.300.000.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

BAB V

MATRIKS

BAB VI PENUTUP

1. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010. Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010, pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2010.
3. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai dengan ketentuan berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Peran serta segenap *stakeholders* sangat diharapkan, baik dalam perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan, maupun dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Di samping itu masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah.

7. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka pembangunan perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. Hasil pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO